

Peran kebijakan negara dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia

Khurfatul Jannah

Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: khurva1234@gmail.com

Kata Kunci:

Ketimpangan; kebijakan;
distribusi; kesejahteraan;
infrastruktur

Keywords:

Inequality; policy; distribution;
prosperity; infrastructure

ABSTRAK

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Indonesia adalah masalah rumit yang disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak seimbang, laju urbanisasi yang cepat, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar bagi masyarakat. Situasi ini berdampak buruk pada stabilitas sosial dan kemajuan nasional, serta meningkatkan ancaman konflik sosial dan kejahatan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program untuk mengurangi kesenjangan tersebut, termasuk redistribusi kekayaan, pengembangan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta reformasi dalam sistem perpajakan. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi banyak kendala, seperti tantangan politik, ekonomi, dan budaya sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab, konsekuensi, dan peran kebijakan pemerintah dalam menangani ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Indonesia. Melalui studi literatur dan data statistik terkini, laporan ini menekankan perlunya pengembangan kebijakan yang didasarkan pada data serta pendekatan yang inklusif untuk mencapai keadilan sosial. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan partisipasi masyarakat, dan inovasi dalam kebijakan sosial serta ekonomi sebagai langkah strategis menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

ABSTRACT

Social and economic inequality in Indonesia is a complex issue caused by uneven wealth distribution, rapid urbanization, and limited access to education and basic services for the community. This situation negatively impacts social stability and national progress, while also increasing the threats of social conflict and crime. The Indonesian government has implemented various programs to reduce these disparities, including wealth redistribution, infrastructure development, improving access to education and healthcare, and reforming the tax system. However, the effectiveness of these policies still faces many obstacles, such as political, economic, and cultural challenges. This research aims to explore the causes, consequences, and the role of government policies in addressing social and economic inequality in Indonesia. Through literature review and recent statistical data, this report emphasizes the need for data-driven policy development and inclusive approaches to achieve social justice. The recommendations include enhancing inter-agency coordination, strengthening community participation, and innovating social and economic policies as strategic steps toward a fairer and more prosperous society.

Pendahuluan

Salah satu permasalahan utama yang dimiliki oleh negara berkembang adalah mengenai masalah ketimpangan, termasuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Masalah ini seringkali menjadi pembahasan utama pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan perekonomian di suatu negara. Namun, seringkali juga kebijakan perekonomian yang dibuat oleh pemerintah malah memperburuk adanya ketimpangan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang terjadi. (Islahiha et al., 2019). Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ketimpangan ini, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam distribusi kekayaan, pendapatan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan di antara berbagai kelompok masyarakat. Sederhananya, ada sebagian kecil masyarakat yang sangat kaya, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. (Fabela & Khairunnisa, 2024)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat sekitar 3,5 juta anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi. (*Statistik Kriminal 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia*, n.d.) Di Jakarta saja, ketimpangan antara kualitas pendidikan atau sekolah si miskin dan si kaya sangat mencolok dan dapat dirasakan oleh semua kalangan, misalnya capaian nilai akademik dan kualitas fasilitas sekolah masing-masing. Padahal secara lugas telah dicantumkan di Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tentang cita-cita Bangsa Indonesia mengenai, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang dalam kenyataannya sampai saat ini masih belum terpenuhi. Di Indonesia, kasus-kasus akibat ketimpangan sosial dan ekonomi sangat sering ditemukan di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, peran kebijakan pemerintah akan upaya meminimalisir adanya ketimpangan sosial dan ekonomi sangat diperlukan, baik dari lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam makalah ini, mengangkat beberapa kerangka teoritis yang relevan guna membantu memahami dan menganalisis ketimpangan ekonomi, seperti Teori Keadilan Sosial oleh John Rawls dan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan oleh pemerintah Indonesia. Menurut John Rawls yang merupakan seorang filsuf politik, bahwa ketidaksetaraan sosial hanya dapat diterima jika hal itu dapat memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Pendapat tersebut diungkapkan dalam prinsipnya, “keadilan sebagai fairness”. Kebijakan negara yang mengimplementasikan prinsip ini adalah kebijakan pendidikan dan kesehatan untuk kelompok marginal. (“Potret, Penyebab, dan Kebijakan Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia,” 2022). Pada Kebijakan Ekonomi Berkeadilan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Kebijakan Ekonomi Berkeadilan (KEB) yang tujuannya adalah mengatai ketimpangan sosial melalui tiga topik utama, meliputi lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menekankan bahwa hal ini bukan hanya tentang kesetaraan perlakuan (equality), namun juga mencakup keadilan dalam mendapatkan sumber daya (equity). (*Pemerintah Luncurkan Program Besar Atasi Ketimpangan Sosial - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, n.d.)

Pembahasan

Ketidakadilan sosial dan ekonomi di Indonesia tetap menjadi suatu tantangan signifikan yang mempengaruhi stabilitas dan pembangunan di tingkat nasional. Banyak

aspek, seperti ketidakmerataan distribusi kekayaan, akses yang terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta perbedaan antar wilayah, semakin memperburuk kesenjangan ini. Dalam hal ini, peranan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting sebagai alat utama dalam usaha mengatasi ketimpangan yang ada. Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencapai pemerataan sosial dan ekonomi, mulai dari program redistribusi kekayaan, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pengembangan infrastruktur di daerah yang tertinggal. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan dan rintangan, baik yang berkaitan dengan sumber daya, birokrasi, maupun faktor sosial dan budaya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan, serta mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketimpangan berarti hal yang tidak sebagaimana mestinya (seperti tidak adil, tidak beres). Artinya, terdapat keadaan atau situasi yang diharapkan tidak terjadi. Oleh karena itu, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diartikan sebagai keadaan yang mendapati perbedaan signifikan dalam hal distribusi sumber daya, peluang, hak, dan keuntungan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang seharusnya seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama. (Bola.com, 2023) Ketimpangan sosial merupakan fenomena perbedaan atau kesenjangan diantara kelompok-kelompok masyarakat untuk mengakses beberapa hal, seperti kesempatan, hak, kewajiban, dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Adanya hal ketimpangan sosial biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam beberapa hal yang krusial dalam masyarakat seperti, sumber daya, kemampuan atau skil, kebijakan, budaya, agama, dan lain-lain. (Muh. Watif et al., 2024)

Ketimpangan ekonomi mengarah kepada perbedaan distribusi pendapatan atau penghasilan atau kekayaan antar individu atau kelompok. Dalam kasus ketimpangan ekonomi, umumnya sangat kental kaitannya dengan perbedaan penampilan dan pendidikan yang mencolok akan perbedaan adanya si kaya dan si miskin. Disetiap permasalahan tentu ada banyak dampak negatif yang timbul, termasuk dalam masalah ketimpangan ini. Banyak sekali kasus yang dapat ditemukan akibat seseorang yang dari golongan bawah merasa tidak sanggup akan perbedaan yang besar ini dan golongan atas, tidak peduli dengan mereka. (Fabela & Khairunnisa, 2024) Oleh sebab itu, disinilah campur tangan pemerintah dalam menetapkan keadilan sangat diperlukan, misalnya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meringankan atau membantu rakyatnya yang tertimpang dibawah. (Amnesti et al., 2024)

Sebab dan Dampak Adanya Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Tidak akan ada banjir, jika tidak ada hujan. Semua masalah pasti ada sebab dan akibatnya, termasuk masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial merupakan suatu fenomena yang muncul akibat adanya perbedaan kualitas hidup yang sangat mencolok, (Septiani et al., 2022) sedangkan ketimpangan ekonomi lebih

mengarah kepada distribusi pendapatan serta kekayaan antar individu maupun kelompok disuatu lingkup masyarakat. (Edelweis Bunga Gunung et al., 2023). Penyebab pertama adanya ketimpangan sosial dan ekonomi adalah ketidakseimbangan ekonomi, misalnya di lingkungan kota yang di mana rentan terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Kelompok penduduk dengan tingkat pendapatan menengah hingga kebawah umumnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, biaya tempat tinggal, makanan, penerimaan layanan kesehatan, dan pendidikan. (Muh. Watif et al., 2024)

Kedua, pertumbuhan urbanisasi yang cepat. Pertumbuhan populasi penduduk yang cepat, nyatanya tidak sebanding dengan pertumbuhan perekonomian yang ada. Hal ini tentu saja dapat memperparah adanya ketimpangan yang biasa orang-orang sebut dengan istilah, “yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.”, dan beberapa penyebab yang lain, seperti akses terhadap kesempatan kerja, infrastruktur dan layanan publik. Beberapa dampak yang muncul dikarenakan masalah ketimpangan ini pun, sangat beragam. Misalnya, kemungkinan muncul konflik sosial, peluang ekonomi kelompok menengah ke bawah yang cenderung terhambat, perbedaan signifikan terhadap keamanan dan kualitas hidup, serta adanya kemungkinan kenaikan kasus kriminalitas.

Peran Kebijakan Negara dalam Menetapkan Keadilan dan Harmonisasi

Kebijakan Retribusi Kekayaan

Ketidakseimbangan kekayaan atau pendapatan menjadi masalah yang cukup serius di tengah arus globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah karena ini menjadi tantangan agar teratasinya masalah dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara tentu memiliki kebijakan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Redistribusi kekayaan atau pendapatan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendistribusikan kembali pendapatan milik masyarakat yang mampu dalam hal ekonomi kepada masyarakat kurang mampu. (Khoirul, 2024). Berbagai program telah diupayakan oleh pemerintah, seperti Program Bantuan Sosial (BANSOS) yang dibagi kembali menjadi beberapa kategori, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sosial pangan.

Program Bantuan Sosial (BANSOS)

Program bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi serta memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data penting dalam penyaluran bansos seperti: Reformasi Pajak, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Pangan.

Reformasi Pajak

Ketidakstabilan ekonomi, dan permasalahan sosial seringkali disebabkan oleh ketimpangan pendapatan. Pemerintah seharusnya mempunyai rencana yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah kesenjangan pendapatan ini. Selain itu, dampak teknologi dan globalisasi terhadap kesenjangan pendapatan mempunyai banyak segi. Globalisasi dapat memperburuk kesenjangan antara individu-individu dengan talenta yang relevan dengan pasar internasional, meskipun globalisasi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Salah satu cara agar pendapatan negara dominan demi keberlangsungan hidup yaitu pajak. Guna menunjang pemasukan sektor pajak secara maksimal pemerintah meresmikan reformasi pajak pada tahun 1983. Reformasi pajak adalah upaya untuk mengubah atau meningkatkan sistem perpajakan dengan tujuan mencapai hasil yang lebih adil, efisien, dan efektif dalam penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi pajak perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiyai pembangunan nasional dengan jalur lebih optimal dan menyempurnakan kebijakan yang lebih siap menghadapi masa depan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) guna mendekatkan kinerja perpajakan pada tingkat potensial.

Peningkatan Akses Pendidikan

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan terus menerus, pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dan kemajuan negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan juga menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Tidak jarang masyarakat menyimpulkan bahwa pendidikan itu tidak penting, hanya membuang waktu, tenaga, dan uang. Pemikiran ini yang membuat Indonesia saat ini kekurangan sumber daya manusia yang baik dan berkompeten. Terlebih lagi bagi masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang belum bisa memenuhi pendidikan anaknya dan kurangnya fasilitas pendidikan. Maka dari itu, pemerintah berupaya memberikan akses terhadap masyarakat yang merasa belum bisa memenuhi dalam hal pendidikan dengan akses pendidikan gratis atau bersubsidi dan beasiswa.

Pendidikan Gratis atau Bersubsidi

Pemerataan pendidikan itu penting karena menjadi salah satu langkah untuk menjamin bahwa setiap orang tanpa memandang latar belakang juga mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan bahwa pendidikan bebas secara sosial ekonomi.

Beasiswa dan Program Pelatihan

Setiap warga NKRI memiliki hak untuk mendapat pengajaran sesuai dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1). Sudah seharusnya pemerintah memberikan akses bagi individu yang memiliki potensi untuk belajar secara formal agar individu dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Beasiswa menjadi salah satu akses pendidikan yang diberikan oleh pemerintah atau institusi pendidikan.

Penyediaan Layanan Kesehatan Gratis

Nyatanya, tidak hanya masyarakat kelas ekonomi menengah keatas yang memiliki orang-orang yang ingin mereka dilindungi. Namun, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah juga memiliki itu. Salah satu yang ingin mereka jaga atas orang-orang yang ingin mereka lindungi adalah kesehatan. (Ridwan, 2015). Akses dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu hal yang akan selalu menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat demi tercapainya upaya kesejahteraan masyarakat. Rumah sakit, sebagai pusat layanan kesehatan yang komprehensif, memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses perawatan berkualitas. (Dwi Binuko & Fauziah, 2024). Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan akses layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Dengan KIS, masyarakat dapat menikmati berbagai layanan kesehatan tanpa biaya atau dengan biaya minimal. Namun, meskipun ada manfaat yang dirasakan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi Kesehatan telah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.

Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu cara pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, dan salah satu program yang mencerminkan hal ini adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah Indonesia meluncurkan PPIP untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di daerah pedesaan. Program ini mengajak partisipasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Infrastruktur juga memiliki peranan krusial sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Untuk lebih memahami ruang lingkup pembangunan infrastruktur, kita dapat membaginya menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. **Pembangunan Infrastruktur Transportasi Pedesaan:** Ini mencakup jalan, jembatan, dan tambatan perahu yang membantu meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat desa.
2. **Pembangunan Infrastruktur Pertanian:** Fokus pada irigasi pedesaan yang mendukung produksi pertanian.
3. **Pembangunan Infrastruktur Kebutuhan Dasar:** Seperti penyediaan air minum yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. (Simbolon et al., 2021)

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kebanyakan tidak berjalan semestinya atau melenceng dari rencana awalnya. Tiga kategori utama tantangan-tantangan yang dimaksud mencakup hambatan politik, kendala ekonomi, dan kendala sosial budaya. adanya hambatan politik dapat dilihat dari masalah kebijakan redistribusi sering terhambat oleh konflik kepentingan. Misalnya, ada kelompok tertentu yang merasa kebijakan tersebut akan merugikan mereka, sehingga mereka mencoba

memengaruhi pengambil kebijakan agar menunda atau bahkan membatalkan kebijakan itu. (Birokrasi, 2024) Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam politik sering kali panjang dan melibatkan banyak kompromi, sehingga kebijakan yang diusulkan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana awal. Kondisi ini sering menimbulkan hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi. Kebijakan ekonomi juga memiliki tantangan yang lain, seperti sulitnya mengimplementasikan kebijakan redistribusi membutuhkan anggaran yang besar, sementara negara mungkin memiliki sumber daya keuangan yang terbatas.

Pencarian dana oleh pihak asing pun, seringkali disertai oleh syarat-syarat yang berat. Misalnya, jika suatu negara sedang mengalami resesi ekonomi, anggaran negara lebih difokuskan pada stabilisasi ekonomi, bukan pada redistribusi. Kondisi seperti ini memperlambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu, ketergantungan pada pendapatan pajak, yang mungkin berkurang saat ekonomi melemah, membuat kebijakan redistribusi menjadi sulit diwujudkan. (Amnesti et al., 2025). Masalah sosial dan budaya juga menjadi tantangan utama. Banyak kebijakan redistribusi yang membutuhkan perubahan pola pikir masyarakat. Namun, norma-norma sosial dan budaya tertentu sering kali sulit diubah, terutama jika ada praktik diskriminasi yang sudah lama mengakar. Misalnya, kebijakan yang bertujuan memberikan akses yang setara kepada kelompok tertentu bisa menghadapi resistensi dari kelompok lain yang merasa terancam atau tidak mendukung perubahan tersebut. Hal ini menciptakan tantangan sosial yang memerlukan strategi komunikasi dan pendekatan yang baik. (*Majalah Hukum Nasional*, n.d.)

Kesimpulan dan Saran

Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia terjadi akibat distribusi yang tidak seimbang, urbanisasi yang pesat, serta minimnya akses masyarakat terhadap pekerjaan dan layanan dasar, yang memicu konflik sosial dan menurunkan kualitas hidup. Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan melalui kebijakan redistribusi kekayaan, penyediaan pendidikan yang lebih inklusif, layanan kesehatan yang terjangkau, serta pembangunan infrastruktur guna menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Pemerintah perlu melakukan penelitian mendalam untuk mengidentifikasi penyebab spesifik ketimpangan sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap masyarakat, dan kemudian menyusun kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan berbasis data untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak ketimpangan sosial dan ekonomi, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan akses pendidikan serta kesehatan yang merata, menerapkan reformasi kebijakan pajak progresif, memperkuat jaminan sosial, dan mempromosikan kesetaraan peluang bagi semua individu untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Amnesti, S. K. W., Imelda, C., Purwanto, P., Sari, S., Sarinah, S., Imandeka, E., Fahrizal, M., Warih, W. C., Himni, L., Kaksim, K., Putra, S. K., & Amane, A. P. O. (2025).

- Kebijakan publik di Era Society 5.0: Kebijakan publik berbasis masyarakat*. CV. Gita Lentera. <https://repository.uin-malang.ac.id/23661/>
- Amnesti, S. K. W., Maryam, S., Wido, C. W., Enos, P., Ariski, A., Ali, M., Hendri, Z., Ade, P. O. A., Ejo, I., & Meitisa, V. S. (2024). *Desain kebijakan publik: Teori dan praktik*. CV. Gita Lentera. <https://repository.uin-malang.ac.id/20176/>
- Birokrasi, H. S. (2024, July 24). Kendala dalam Implementasi Kebijakan dari Sisi Birokrasi dan Solusinya. *Seputar Birokrasi*. <https://seputarbirokrasi.com/kendala-dalam-implementasi-kebijakan-dari-sisi-birokrasi-dan-solusinya/>
- Bola.com. (2023, October 12). *Pengertian Ketimpangan Sosial, Penyebab, dan Bentuk-bentuknya*. bola.com. <https://www.bola.com/ragam/read/5421540/pengertian-ketimpangan-sosial-penyebab-dan-bentuk-bentuknya>
- Dwi Binuko, R. S., & Fauziyah, N. F. (2024). Pengaruh Faktor Ekonomi dan Sosial Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARS)*, 8(2), 123–134. <https://doi.org/10.52643/marsi.v8i2.4182>
- Edelweis Bunga Gunung, David Setiawan, & Muhammad Yasin. (2023). Menganalisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 329–339. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.1688>
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3004>
- Islahiha, N. A., Frita, N., & Maulana, R. (2019). PENERAPAN SISTEM PEREKONOMIAN SYARIAH DALAM MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA. *PKM-P*, 3(2). <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v3i2.472>
- Khoirul, F. A. A. (2024). Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan dan Perubahan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan di Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/ijps.2024.4.1.1-10>
- Majalah Hukum Nasional*. (n.d.). Retrieved December 5, 2024, from <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN>
- Muh. Watif, Aulya Ramadhani.JT, Jumiati, Luthfiah Syam Almazini Tahir, & Nurul Hikmah. (2024). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 536–547. <https://doi.org/10.56799/peshum.v3i4.3811>
- Pemerintah Luncurkan Program Besar Atasi Ketimpangan Sosial—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved December 15, 2024, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2617/pemerintah-luncurkan-program-besar-atasi-ketimpangan-sosial>
- Potret, Penyebab, dan Kebijakan Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. (2022, September 20). *Kompaspedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-penyebab-dan-kebijakan-mengatasi-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia>
- Ridwan, A. M. (2015). *Agama Dan Kemiskinan Kajian Tentang Perilaku Agama Kaum Miskin Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan [Research]*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/3401/>
- Septiani, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). MENGATASI DAN MENYIKAPI KESENJANGAN SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN PENERAPAN EKONOMI

SYARIAH. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 140–148.
<https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.130>

Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., & Manulang, Y. (2021). *PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR*. 5.

Statistik Kriminal 2023—Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). Retrieved October 13, 2024, from
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2bofe5429aof232c736/statistik-kriminal-2023.html?form=MGoAV3>